



**CETAR!**  
CERIT, SERTIF & SYARIAH, TAWASAP, TRANSFORMASI, KONSEP, RESPONSI

RSUD Karsa Husada Batu  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

# BUKU SAKU

Pembangunan Zona Integritas

Menuju WBK/WBBM

# DAFTAR ISI

<b>Question &amp; Answer</b>	2
<b>Pedoman Pembangunan Zona Integritas</b>	19
<b>Menuju WBK/WBBM</b>	
● 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	20
● 5 prioritas kerja 2019-2024	20
● Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM	21
● Dasar hukum Zona Integritas	22
● Syarat Pengajuan	23
● Minimal requirement	23
● Langkah pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM	24
● Strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM	24
● Capaian ZI Jawa Timur	25
● Permasalahan pembangunan Zona Integritas menuju WBK	26
● Permasalahan pembangunan Zona Integritas menuju WBK	26



# 01

## Apa kepanjangan ZI? Apa yang dimaksud dengan ZI?

ZI adalah singkatan Zona Integritas. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diubah ke PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

# 02

## Apa kepanjangan WBK ?

WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi. (Menuju) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program, antara lain:

1. Manajemen perubahan,
2. Penataan tata laksana,
3. Penataan sistem manajemen SDM
4. Penguatan pengawasan, dan
5. Penguatan akuntabilitas kinerja

## 03

### Apa yang dimaksud dengan (Menuju) WBBM?

WBBM adalah singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. (Menuju) WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik. Menuju WBBM memiliki pengertian sebagai sebuah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar

1. Manajemen perubahan,
2. Penata ketatalaksana,
3. Penataan sistem manajemen SDM,
4. Penguatan pengawasan,
5. Penguatan akuntabilitas kinerja, dan
6. Penguatan kualitas pelayanan publik.

## 04

### Sebutkan tahap-tahap pembangunan Zona Integritas?

Terdapat beberapa tahapan dalam membangun Zona Integritas, antara lain :

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)
  - a. Pencanangan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun ZI.
  - b. Pencanangan Pembangunan ZI dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpin dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/ melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI

- c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-bersama. Sedangkan Pencanangan d. Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama dalam satu provinsi.
2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Dimulai dari proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas, pengusulan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja yang berpredikat Zona Integritas, hingga menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

## 05

### Komponen apa saja yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu

#### 1. Komponen pengungkit

Merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan,
- b. Penataan Tatalaksana,
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
- e. Penguatan Pengawasan, dan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

## **2. Komponen Hasil**

Merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN,
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

# **06**

## **Bagaimana keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur?**

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil.

### **1. Komponen Pengungkit diberi bobot 60%**

masing-masing Komponen Pengungkit, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan : 5%
- b. Penataan Tatalaksana : 5%
- c. Penataan Manajemen SDM : 15%
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%
- e. Penguatan Pengawasan : 15%
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%

### **2. Komponen Hasil diberi bobot 40%.**

masing-masing Komponen Hasil, yaitu:

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20%
- b. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): 20%

# 07

## Apa singkatan dari KKN?

KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

# 08

## Apa yang dimaksud dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme termuat 3 pengertian:

1. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.
2. Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
3. Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

**09**

## **Sebutkan tujuh klasifikasi korupsi?**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tujuh klasifikasi korupsi yang termuat dalam 13 pasal undang-undang, antara lain:

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap menuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Konflik kepentingan
7. Gratifikasi

**10**

## **Apa yang dimaksud merugikan keuangan negara Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan apa yang dimaksud dengan meruhikan keuangan negara, yang kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yakni:

1. **Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.** Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
2. **Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.** Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu di atas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

**11**

## **Apa yang dimaksud dengan suap menyuap?**

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 dijelaskan bahwa suap menyuap terjadi ketika pegawai negeri memberi atau menerima hadiah yang bertujuan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap

**12**

## **Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan/ penggelapan dalam jabatan?**

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

## 13

**Apa yang dimaksud dengan pemerasan? Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :**

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
  - a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
  - b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

## 14

**Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan (perbuatan curang)?**

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini termuat dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

# 15

## Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan?

Konflik kepentingan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Buku Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara (2009) didefinisikan sebagai situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;  
Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;  
Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

6. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
7. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
8. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
9. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
10. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya);
11. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
12. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

# 16

## Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?

Gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Gubernur no 35 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, Provinsi Jawa Timur telah menyusun peraturan gubernur terkait gratifikasi

# 17

## Apa saja hal yang termasuk larangan menerima/memberikan gratifikasi oleh pegawai?

Setiap Pegawai dilarang menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

1. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi
2. kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
3. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;
4. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/auditor/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas;

## 18

### Bagaimana suatu gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:

1. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima
2. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
3. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) satuan kerja dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

Pelaporan dapat dilakukan pada ketua UP-PPG Pemprov Jatim yang berada di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

## 19

### Apabila Anda menerima gratifikasi, apa yang akan Anda lakukan?

Yang akan dilakukan apabila menerima gratifikasi:

1. Saya akan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas saya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi, atau
2. Saya akan menyampaikan Formulir Laporan Gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) RSHS d.a. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi, atau
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas terlampaui, maka saya akan menyampikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK (online).

# 20

## Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau KPK adalah

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
10. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

**21**

## **Apa yang dimaksud dengan WBS?**

WBS (Whistle Blowing System) menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur no 65 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur WBS adalah singkatan dari Whistle Blowing System sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran integritas lainnya yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja

**22**

## **Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan whistle blower.**

### **Apa yang dimaksud dengan whistle blower?**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Whistle blower adalah pelapor yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi dan pelapor tersebut bukan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi yang dilaporkannya.

**23**

## **Apa yang akan Anda lakukan apabila melihat/menemukan tindak pidana korupsi?**

Saya akan bertindak sebagai whistle blower dengan cara melaporkan tindak pidana korupsi tersebut

# 24

## Apa yang anda ketahui tentang pelaporan WBS Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka memudahkan pelaporan oleh whistle blower Provinsi Jawa Timur membuat sistem informasi dengan alamat wbs.jatimprov.go.id yang merupakan sistem informasi pelaporan Whistle blowing System (WBS) Jawa Timur sebagai sarana pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh inspektorat Provinsi Jawa Timur



# 25

## Apa yang dimaksud dengan Agen Perubahan?

Agen Perubahan menurut PermenPAN RB no 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.

# 26

## Apa saja kriteria menjadi Agen Perubahan?

Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi Agen Perubahan adalah:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi

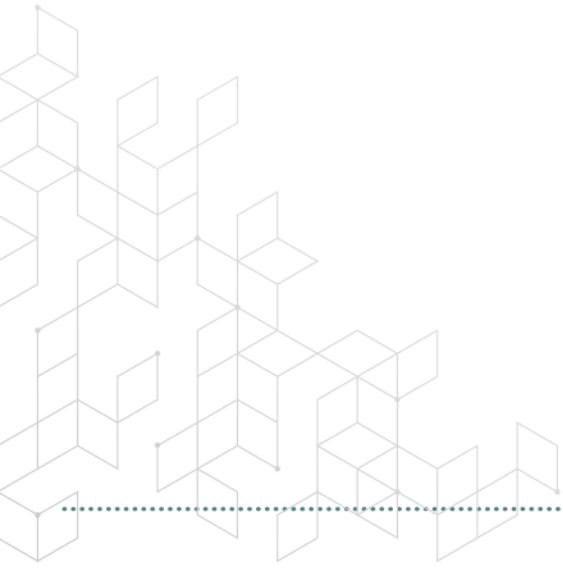
# 27

## Apa saja peran dan tugas Agen Perubahan?

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;



# **PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM**



# 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

## Sasaran Reformasi Birokrasi

1. Birokrasi yang bersih & akuntabel
2. Birokrasi yang kapabel
3. Pelayanan publik yang prima



## 5 Prioritas Kerja 2019-2024

### Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

### Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

### Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan dipotong dan dipangkas
- Omnibus Law

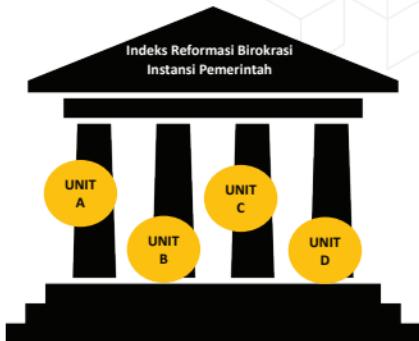
### Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2(dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

### Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

# Ilustrasi RB & ZI WBK/WBBM



## Unit Percontohan

1. Dianggap sebagai unit yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

1. Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia
2. Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
3. Membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

No	REFORMASI BIROKRASI	ZONA INTEGRITAS (Menuju WBK/WBBM)
1.	<b>Instansi Pemerintah</b> (contoh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah)	<b>Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah</b> (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, dsb)
2.	<b>Unsur Pengungkit (8 Area)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen Perubahan</li><li>2. Tatalaksana</li><li>3. Manajemen SDM</li><li>4. Akuntabilitas</li><li>5. Pengawasan</li><li>6. Pelayanan Publik</li><li>7. Organisasi</li><li>8. Deregulasi Kebijakan</li></ol>	<b>Unsur Pengungkit (6 Area)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen Perubahan</li><li>2. Tatalaksana</li><li>3. Manajemen SDM</li><li>4. Akuntabilitas</li><li>5. Pengawasan</li><li>6. Pelayanan Publik</li></ol>
3.	<b>Hasil (3 sasaran)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel</li><li>2. Birokrasi yang Kapabel</li><li>3. Pelayanan Publik yang Prima</li></ol>	<b>Hasil (2 sasaran)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (IPAK, TLHP)</li><li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (IPP)</li></ol>

# Dasar Hukum ZI

- **PermenPAN RB  
No. 52 Thn 2014**

Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI)

- **PermenPAN RB  
No. 10 Thn 2019**

Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaaguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

- Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

## PERPRES 55/2012

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014

## PERPRES 54/2019

Strategi Nasional pencegahan korupsi

### Tugas Tim Nasasional

1. Koordinasi, sinkronasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Stranas PK
2. Membuat laporan capaian pelaksanaan Stranas PK
3. Mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PK kepada masyarakat

Penanggung Jawab

PRESIDEN RI  
Kepala Negara

Pengarah

TIK NACIONAL  
PENCEGAHAN KORUPSI  
(Bappenas - Kemendagri -  
Kemenpan RB - KSP - KPK)  
Pimpinan Lembaga

KEMENTERIAN  
KOORDINATOR

Pengurus Harian

KOORDINATOR PELAKSANA  
(Bappenas - Kemendagri -  
Kemenpan RB - KSP - KPK)

Pelaksana Teknis

TIM SETNAS PK

Aksi di K/L sebagai PJ  
Aksi di Daerah sebagai PJ

## 3 FOKUS 11 AKSI

### Perijinan & Tata Niaga

1. Peningkatan perijinan dan kepuatan pribadi dan perusahaan modal
2. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan
3. Utilitas nomor induk kependudukan untuk pebaikan tata kelola pembiruan bantuan sosial dan subsidi
4. Integrasi dan sinkronisasi data impor-pangan strategis
5. Penerapan manajemen anti suap di pemerintah dan sektor swasta

### Keuangan Negara

1. Integral sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
2. Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa
3. Optimalisasi penerimaan Negara dari penerimaan pajak dan non-pajak

### Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

1. Penguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Implementasi grand design strategi pengawasan keuangan desa
3. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana

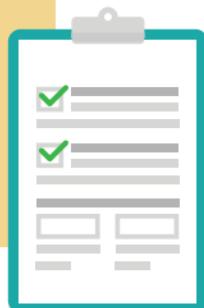
# Syarat Pengajuan

PermenPANRB no 10 Tahun 2019

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WDP" Nilai AKIP minimal "B"	Opini BPK minimal "WTP"
Tingkat unit kerja		Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya Mengelola sumber daya yang cukup besar Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
LHKASN dan LHKPN 100%		

## Minimal Requirement

SYARAT	WBK	WBBM
<b>1. Minimal nilai total komponen Pengungkit</b> 1. Manajemen Perubahan, 2. Penataan Tatalaksana, 3. Penataan Sistem 4. Manajemen SDM, 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 6. Penguatan Pengawasan,	75	85
<b>2. Minimal nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN"</b> 1. Minimal nilai Sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" 2. Minimal nilai sub-komponen "Persentasi TLHP"	18  13,5	18  13,5
<b>3. Minimal nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat"</b>	-	16



# Langkah membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

- 1.** Kepala PD mengusulkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 2.** Unit Kerja percontohan yang ditetapkan menyusun rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM. (Indikator Pengungkit dan Hasil)
- 3.** Unit kerja percontohan melaksanakan Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan.
- 4.** Unit kerja percontohan melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan.
- 5.** Tim Penilai Internal melakukan penilaian kepada Unit kerja percontohan atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dilakukan.
- 6.** Apabila Hasil Penilaian Tim Internal , Unit Kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, Unit Kerja tersebut Diajukan Kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Eksternal untuk dilakukan evaluasi. Hasil Evaluasi akan menetapkan apakah unit kerja lulus atau tidak sebagai WBK/WBBM

## Strategi Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju WBK/WBBM

### Mindset/Culture set & Komitmen



Komitmen nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

### Monitoring dan Evaluasi



Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan

### Kemudahan, kecepatan, & transparansi pelayanan



Menyediakan Fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta, Semangat Hospitality untuk kepuasan publik

### Manajemen Media



Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat



### Program yang menyentuh masyarakat

Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

# Capaian ZI Jawa Timur

**Terdapat  
8 Unit Perangkat Daerah  
yang mendapat  
Predikat WBK**



## PREDIKAT WBK TAHUN 2019

1. UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah;
2. UPT. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. RSU Haji Surabaya;
5. RSU Jiwa Menur Surabaya;
6. UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

## PREDIKAT WBK TAHUN 2020

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Nganjuk (Kantor Bersama SAMSAT), Badan Pendapatan Daerah

## PREDIKAT WBK TAHUN 2021

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pasuruan Badan Pendapatan Daerah

# Permasalahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK

<b>Bukan Unit Strategis</b>	<b>Komitmen Pimpinan Rendah</b>	<b>Kinerja belum menjadi dasar</b>	<b>Inovasi belum sesuai</b>	<b>Continous Improvement rendah</b>
Unit kerja yang diusulkan bukan merupakan unit kerja strategis (core business) dari suatu instansi pemerintah	Komitmen pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas suatu unit kerja masih rendah	Kinerja belum menjadi dasar pembangunan zona integritas	Inovasi yang dibangun tidak sesuai/ berdampak langsung oada kinerja, penguan integritas mauoun dan kemudahan pelayanan	Zona integritas dipandang sebagai proyek semata untuk mendapat oredikat, sehingga upaya continous improvement masih rendah

# Permasalahan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM

<b>Belum Memberi Pengaruh</b>	<b>Tidak Optimalnya Replikasi</b>	<b>Rendahnya Konsistensi</b>	<b>Kurangnya Kolaborasi</b>	<b>Evaluasi Inovasi</b>
Unit kerja yang diusulkan belum memberi pengaruh pada unit kerja lain untuk melakukan pembangunan menuju WBK	Aplikasi yang dimiliki belum direplikasi secara optimal oleh unit kerja lain baik didalam maupun diluar Instansi Provinsi Jawa Timur	Rendahnya konsistensi dalam mewujudkan pelayanan publik pada unit kerja	Kurangnya kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan	Evaluasi inovasi atas kebermanfaatannya